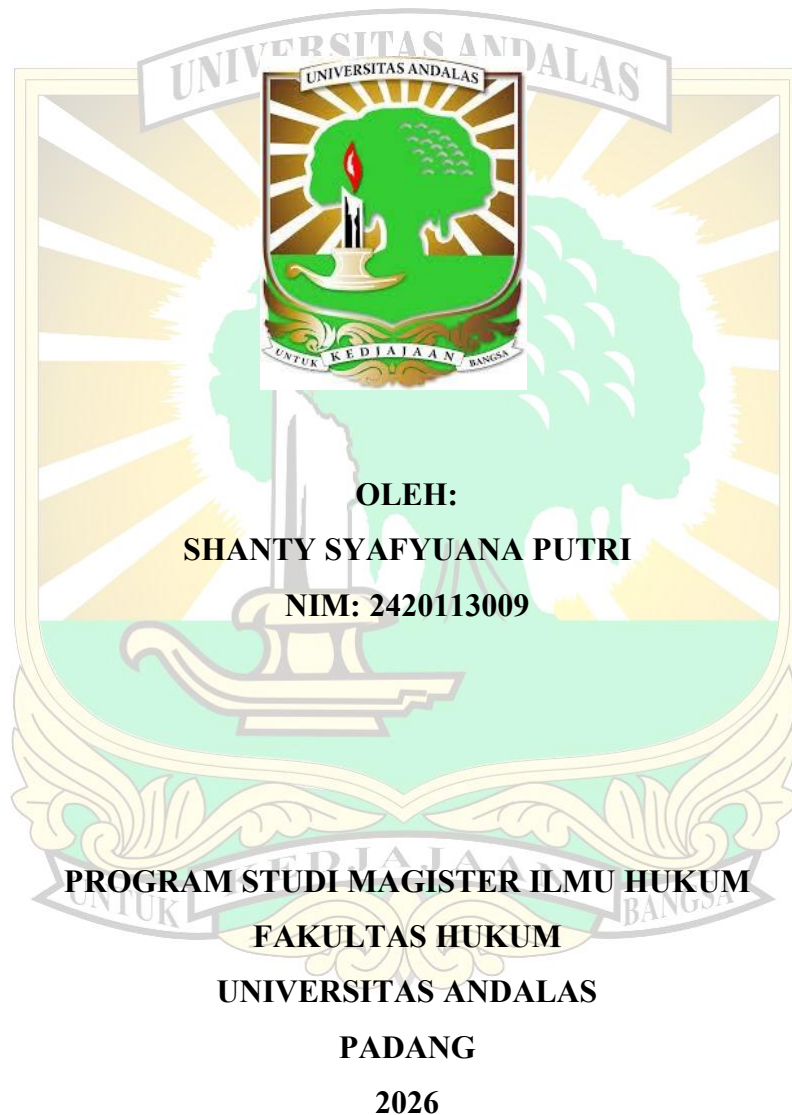


**URGENSI PENGATURAN BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN
HUKUM (*EXCLUSIONARY RULE*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA: PERSPEKTIF HARMONISASI KUHP DAN KUHP BARU
TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Andalas**



HALAMAN PENGESAHAN *VALIDITY SHEET*

No.Reg: 19/MH/42026

**URGENSI PENGATURAN BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM
(*EXCLUSIONARY RULE*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA:
PERSPEKTIF HARMONISASI KUHP DAN KUHP BARU**

***THE URGENCY OF REGULATING EVIDENCE OBTAINED ILLEGALLY (EXCLUSIONARY
RULE) IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: A PERSPECTIVE ON
HARMONIZING THE NEW CRIMINAL CODE AND CRIMINAL PROCEDURE CODE***

Disusun Oleh:

Author:

Shanty Syafyuana Putri

2420113009

Program Studi : Magister Hukum

Study Program : Master of Law

**Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14
Agustus 2026 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:**

***This Thesis Has Been Defended In A Comprehensive Examination Session On August
14th, 2026 and Declared Passed By The Examining Team Consisting Of:***

Pembimbing I
Supervisor I

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.
NIP. 19591010987021002

Pembimbing II
Supervisor II

Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.
NIP. 197905182005011003

Penguji I
Examiner I

Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
NIP. 196311121990031003

Penguji II
Examiner II

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 196212311989011002

Penguji III
Examiner III

Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.
NIP. 197407241999032004

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi
Head Of Study Program

Dr. Yasniwati, S.H., M.H.
NIP. 197211132005012001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shanty Syafyuana Putri

NIM : 2420113009

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat dengan judul :

URGENSI PENGATURAN BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM (*EXCLUSIONARY RULE*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PERSPEKTIF HARMONISASI KUHP DAN KUHP BARU

adalah :

1. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 17 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan

Shanty Syafyuana Putri

NIM. 2420113009

**URGENSI PENGATURAN BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN
HUKUM (*EXCLUSIONARY RULE*) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA: PERSPEKTIF HARMONISASI KUHP DAN KUHP BARU**
(Shanty Syafyuana Putri, 2420113009, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Andalas, 123 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia melalui sistem peradilan pidana. Namun, praktik penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*illegally obtained evidence*), seperti melalui penyiksaan, intimidasi, atau pelanggaran prosedur, masih terjadi meskipun KUHP mensyaratkan alat bukti diperoleh secara sah. Kondisi ini mencerminkan dominannya paradigma *crime control model* yang mengutamakan efektivitas penegakan hukum dibandingkan *due process of law*, sehingga berpotensi melegitimasi penyalahgunaan wewenang dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Oleh karena itu, penerapan *Exclusionary Rules* menjadi penting untuk menjamin hanya alat bukti yang diperoleh secara sah yang dapat digunakan dalam pembuktian. Meskipun prinsip ini telah diterapkan di berbagai negara, pengaturannya di Indonesia masih belum komprehensif, sehingga rekonstruksi *Exclusionary Rules* menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem pembuktian pidana yang berintegritas. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimana urgensi ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *Exclusionary Rule* terhadap praktik penerimaan alat bukti di pengadilan (2) Bagaimana reformasi pengaturan *exclusionary rule* menjadi urgensi jika ditinjau dari perspektif harmonisasi hukum pasca-pengesahan KUHP baru?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Pengaturan *Exclusionary Rules* dalam sistem pembuktian pidana Indonesia belum memberikan kepastian hukum terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan KUHP yang mengatur secara tegas penerapan *Exclusionary Rules* guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. dan (2) Prinsip *exclusionary rule* bertujuan menolak penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin proses peradilan yang adil. Namun, KUHP belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap alat bukti tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan hakim. Oleh karena itu, pengaturan *exclusionary rule* secara eksplisit dalam KUHP menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, integritas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pengaturan, Bukti, Melawan Hukum, *Exclusionary Rule*, Sistem Peradilan Pidana

**THE URGENCY OF REGULATING EVIDENCE OBTAINED ILLEGALLY
(EXCLUSIONARY RULE) IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: A
PERSPECTIVE ON HARMONIZING THE NEW CRIMINAL CODE AND CRIMINAL
PROCEDURE CODE**

(Shanty Syafyuana Putri, 2420113009, Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas
Andalas, 123 Pages, 2026)

ABSTRACT

Criminal law enforcement aims to achieve legal certainty, justice, and the protection of human rights through the criminal justice system. However, the use of illegally obtained evidence, including evidence acquired through torture, intimidation, or procedural violations, continues to occur despite the requirement under the Criminal Procedure Code that evidence must be lawfully obtained. This condition reflects the predominance of the crime control model, which prioritizes the effectiveness of law enforcement over the principles of due process of law. Consequently, it creates the potential to legitimize abuses of authority and undermine public confidence in the judicial system. In this context, the application of the exclusionary rule is essential to ensure that only lawfully obtained evidence may be admitted in criminal proceedings. Although this principle has been adopted in various jurisdictions, its regulation in Indonesia remains incomplete. Accordingly, reconstructing the exclusionary rule has become an urgent necessity to promote legal certainty, safeguard human rights, and strengthen the integrity of the criminal evidentiary system. This study addresses the following research questions: (1) What are the legal implications of the absence of explicit regulation concerning the exclusionary rule for the admissibility of evidence in court proceedings? and (2) Why has the reform of exclusionary rule regulation become an urgent necessity from the perspective of legal harmonization following the enactment of the new Criminal Procedure Code? This research employs a normative juridical research method. The findings of this study indicate that: (1) the current regulation of the exclusionary rule within Indonesia's criminal evidentiary system has not provided adequate legal certainty regarding evidence obtained through unlawful means. Therefore, amendments to the Criminal Procedure Code are necessary to explicitly regulate the application of the exclusionary rule in order to ensure legal certainty, justice, and the protection of human rights; and (2) the exclusionary rule is intended to exclude evidence obtained unlawfully from use in criminal proceedings, thereby protecting human rights and ensuring a fair trial. However, the Criminal Procedure Code does not expressly regulate the legal consequences of such unlawfully obtained evidence, resulting in legal uncertainty and inconsistent judicial decisions. Accordingly, the explicit incorporation of the exclusionary rule into the Criminal Procedure Code constitutes an urgent legal reform to promote legal certainty, justice, the integrity of law enforcement, and the protection of human rights.

Keywords: Regulation, Evidence, Illegally Obtained Evidence, Exclusionary Rule, Criminal Justice System